



**PENGARUH KOMPETENSI SDM PEMERINTAH,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

GALUH ARIMBI

1715100130

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GALUH ARIMBI
NPM : 1715100130
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPETENSI SDM
PEMERINTAH, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH

MEDAN, SEPTEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., MSi., Ak., CA)

PEMBIMBING I

(Anggi Pratama Nasution, SE., MSi)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, SH., MKn)

PEMBIMBING II

(Dito Aditia Dharma, SE., MSi)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : GALUH ARIMBI
NPM : 1715100130
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPETENSI SDM
PEMERINTAH, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH

MEDAN, SEPTEMBER 2021

KETUA

(Handriyani Dwilita, SE., MSi)

ANGGOTA I

(Anggi Pratama Nasution, SE., MSi)

ANGGOTA II

(Dito Aditia Dharma, SE., MSi)

ANGGOTA III

(Dr Rahima Br. Purba, SE., Msi., Ak., CA)

ANGGOTA IV

(Pipit Buana Sari, SE., MM)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GALUH ARIMBI
Npm : 1715100130
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI SDM
PEMERINTAH, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 September 2021


19D0AAJX481366404
(GALUH ARIMBI)
NPM: 1715100130



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap	: GALUH ARIMBI
Tgl. Lahir	: KUALA SIMPANG / 12 Oktober 1997
Nomor Mahasiswa	: 1715100130
Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
SKS yang telah dicapai	: 127 SKS, IPK 3.50
Nomor Pendaftaran	: 087851252310
Menyatakan mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Daerah

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu

Medan, 03 Maret 2021

Pemohon,

(Galuh Arimbi)

Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Akuntansi

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II.

(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si.)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GALUH ARIMBI
NPM : 1715100130
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Daerah

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
11 Januari 2021	ACC seminar proposal dari Pembimbing 1	Disetujui	
10 Juni 2021	Acc sidang skripsi dari Pembimbing 1	Disetujui	
21 September 2021	acc jilid lux dari pembimbing 1	Disetujui	

Medan, 24 September 2021
Dosen Pembimbing,



Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GALUH ARIMBI
NPM : 1715100130
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Daerah

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
09 Februari 2021	ACC untuk Seminar Proposal	Disetujui	
04 Juli 2021	ACC untuk Ujian Sidang Meja Hijau	Disetujui	
24 September 2021	ACC Pengesahan/Jilid	Disetujui	

Medan, 24 September 2021
Dosen Pembimbing,



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 17/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: GALUH ARIMBI

: 1715100130

t/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Akuntansi

sannya terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 08 Juli 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 September 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALUH ARIMBI
 Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Simpang / 12 Oktober 1997
 Nama Orang Tua : SENTOT SUNARSO
 N. P. M : 1715100130
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 087851252310
 Alamat : Jalan Pekan Baru Gang Pekan Baru No.05 Rambung
 Barat Binjai Selatan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Daerah**, Selanjutnya saya menya

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya sete lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transki sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M. Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



GALUH ARIMBI
 1715100130

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Analyzed document: GALUH ARIMBI_1715100130_AKUNTANSI.doc Licensed for Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

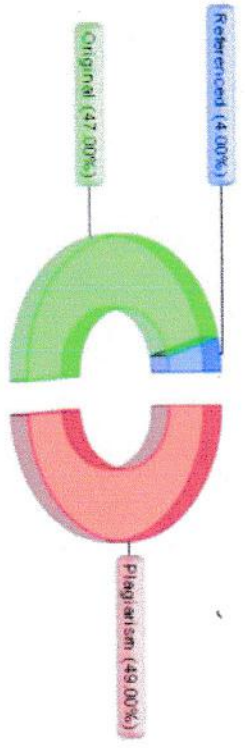
Comparison Preset: Rewrite

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 45

CC Untuk Jilid Lux /
Pengesahan
23/1/2021
DAD Nasion, SE, M.Si
Dosen Pembimbing - II



Devi Judo
21/9/2021
Ayo

**PENGARUH KOMPETENSI SDM PEMERINTAH,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

GALUH ARIMBI
1715100130

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka. LPMU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERSHADI MUHARRAM RITONGA
PANGPANG BANGUNAN PANGPANG



Ersyadi Muharram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : GALUH ARIMBI
N. P. M : 1715100130
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Simpang / 12 Oktober 1997
Alamat : Jalan Pekan Baru Gang Pekan Baru No.05 Rambung Barat Binjai Selatan
No. HP : 087851252310
Nama Orang Tua : SENTOT SUNARSO/TENGGU SRI RAHAYU
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Daerah

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GALUH ARIMBI
Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang / 12-10-1997
NPM : 1715100130
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. PEKAN BARU GG. P.BARU V LK. II

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 06 November 2021

Yang membuat pernyataan


GALUH ARIMBI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif bersifat kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*). Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 40 pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan secara bersama-sama kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 64,4%. Sedangkan sisanya 35,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Kata Kunci: Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan keuangan Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to empirically prove the influence of the competence of government human resources, the application of accounting systems and accounting information systems on the quality of regional financial reports. This research was conducted at the Binjai City Regional Work Unit (SKPD). This study uses a quantitative associative research type. The data analysis technique used is data quality test, classic assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test and determination coefficient test (Adjusted R Square). The basis for sampling in this study using purposive sampling with a sample size of 40 employees. The results of this study indicate that the competence of government human resources has a significant positive effect on the quality of regional financial reports. The application of the accounting system has a significant positive effect on the quality of financial statements. The accounting information system has a significant positive effect on the quality of regional financial reports. Meanwhile, together the competence of government human resources, the application of accounting systems and accounting information systems has a significant positive effect on the quality of regional financial reports. This can be seen in the results of the coefficient of determination (Adjusted R Square) which means the variability of the dependent variable which can be explained by the independent variable 64.4%. While the remaining 35.6% is explained by other variables that are not included in the regression model.

Keywords: Government HR Competencies, Implementation of Accounting Systems, Government Accounting Systems and Quality of Regional Financial Reports.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanna Waa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., MSi., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., MSi selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Dito Aditia Dharma, SE., MSi selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Terkhusus kedua orang tua penulis Sentot Sunarso, SE dan Ibu Tengku Sri Rahayu, yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayang kepada penulis.
8. Kepada abang penulis Sertu M Julian Yudistira dan kakak Indri Larasati Ahmadi, Am.Keb, yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Irawati, Cut Agus Maudina, Yesica Patricia Sitepu dan Debby Purnama Sari Sitepu yang telah banyak memberikan saran dan masukan keada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, September 2021

Galuh Arimbi
NPM: 1715100130

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Penulisan Sebelumnya.....	42
2.3 Kerangka Konseptual	43
2.3 Kerangka Konseptual	45
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.4.1 Variabel Penelitian	52
3.4.2 Definisi Operasional.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Teknik Analisis Data	55
BAB VI : METODOLOGI PENELITIAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	62
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.1.2 Karakteristik Responden.....	65
4.1.3 Uji Kualitas Data	66
4.1.4 Uji Asumsi Klasik	69
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	73

4.1.6 Uji Hipotesis.....	74
4.1.7 Uji Koefisien Determinasi	76
4.2 Pembahasan	77
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	82
5.1 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	42
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 3.2 Sampel Penelitian	50
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel	53
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan	65
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	66
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	66
Tabel 4.5 Uji Validitas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	67
Tabel 4.6 Uji Validitas Pengendalian Internal	67
Tabel 4.7 Uji Validitas Kesesuaian Kompensasi	68
Tabel 4.8 Uji Validitas Ketaatan Aturan Akuntansi.....	68
Tabel 4.9 Uji Reabilitas.....	69
Tabel 4.10 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	70
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas <i>Tolance</i> dan VIF.....	71
Tabel 4.12 Uji Regresi Linear Berganda.....	73
Tabel 4.13 Uji Parsial (Uji-t).....	74
Tabel 4.14 Uji Simultan (Uji-F)	75
Tabel 4.15 Uji Koefesien Determinasi	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	45
Gambar 4.1 Logo Pemerintah Kota Binjai.....	62
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	70
Gambar 4.3 Grafik <i>Normality P-plot</i>	70
Gambar 4.4 Grafik <i>Scatter-plot</i>	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data Responden
- Lampiran 3. Hasil Uji Validitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Reabilitas
- Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 8. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut.

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Abdul Halim, 2013). Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (Ratifah dan Ridwan, 2012).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu

dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Udiyanti et al, 2014). Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada (Udiyanti et al, 2014).

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I-2016 untuk tahun pelaporan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam LKPD 2015, tercatat hanya 58 persen atau 312 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sementara itu, LKPD lainnya tercatat memperoleh opini lain seperti Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat, dan Tidak Wajar (TW). Wajar dengan Pengecualian (WDP) tercatat ada 187 LKPD, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 30, dan Tidak Wajar (TW) empat LKPD.

Badan Pemeriksa Keuangan juga mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Sebanyak 51 persen permasalahan adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Pasal 33, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila Pemerintah Daerah belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria andal (*reliable*) dan relevan, sedangkan dua unsur nilai informasi ini sangat penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Disamping itu akan terjadi kesulitan apabila akan diperbandingkan antar periode (Erma Setiawati, 2014).

Menurut Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh faktor Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Vicky (2013) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan. Hasil Penelitian Vicky (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan arah positif. Menurut Angga Dwi (2013) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Angga Dwi (2013) hanya 25,6% Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau dapat dikatakan terdapat faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dinas daerah sebagai organisasi pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Pegawai penatausaha keuangan pada dinas-dinas di daerah harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode akuntansi. Seseorang belum dapat dikatakan memahami penyusunan laporan keuangan jika belum memahami akuntansi. Pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dibutuhkan untuk dapat mengelola informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas.

Selain sumber daya manusia yang kompeten, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Lebih lanjut Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara Dalam Sambutannya di Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2015 menyampaikan bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka tahun 2015 merupakan tahun pertama pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban serta kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Dengan LKPD berbasis akrual ini pemda telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah” (bpk.go.id, 2016).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan Standar akuntansi pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan

laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif. Secara umum terdapat lima masalah pokok yang ditemukan BPK dalam upaya implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang belum sepenuhnya efektif diantaranya: (1) Pemerintah daerah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual, namun belum relevan dan mutakhir, (2) Analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, aset dan IT serta *pererview* LKPD dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah belum memadai, (3) Optimalisasi pegawai pengelola keuangan aset dan IT serta *pererview* LKPD dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah belum memadai, (4) Implementasi pengembangan sistem aplikasi berkelanjutan dalam pengelolaan teknologi informasi belum sepenuhnya dilaksanakan, (5) Penerapan pengendalian umum atas aplikasi keuangan daerah belum optimal (bpk.go.id, 2016).

Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan sistem akuntansi. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mampu memberikan output data berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen hingga laporan dihasilkan.

Tahun Anggaran (TA) 2018 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walau sudah kali keenam mengantongi opini WTP, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu catatan yang diberikan adalah masih belum tepatnya pencatatan aset-aset daerah Kota Binjai. Banyak aset milik Pemerintah daerah Kota Binjai yang belum jelas statusnya seperti beberapa bangunan Pemerintah Daerah Kota Binjai. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Amir Hamzah juga memaparkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai masih belum memenuhi kompetensi sebesar 40 persen (*tribunmedan.com, 2018*).

Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan Devi Roeviyanti (2012) yaitu kompetensi SDM dan penerapan standar akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Angga Dwi Rahmadi (2013) menyatakan bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putriasri Pujanira (2017) yang menyatakan bahwa, kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan secara bersama-sama kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah dan penerapan

sistem akuntansi keuangan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang nantinya dapat memberikan hasil yang lebih memadai dengan data yang relevan pada kondisi sekarang ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Binjai)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka peneliti menyimpulkan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagian besar staf keuangan belum memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi yang di sebabkan banyaknya rotasi sehingga mengindikasikan kualitas laporan keuangan daerah menjadi berkurang.
2. Adanya *research gap*, yaitu perbedaan hasil penelitian terdahulu.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis hanya membahas mengenai Kompetensi SDM Pemerintah (X1), Penerapan Standar Akuntansi (X2) dan Sistem Informasi Akuntansi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Alasan pembatasan masalah ini karena hubungan antara Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Informasi Akuntansi memberikan pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
4. Bagaimana pengaruh SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Untuk membuktikan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Untuk membuktikan pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4. Untuk membuktikan pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama terkait Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata, mengetahui lebih dalam tentang Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Bagi Organisasi

Dapat menjadikan solusi bagi perusahaan mengenai masalah-masalah yang terjadi dan menjadi solusi pengambilan keputusan mengenai kebijakan baru yang akan dibuat.

3. Bagi Universitas

Dapat menjadi tambahan referensi sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Febrian Haty Ramadhan Parera dan Teguh Erawati (2018) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. **Model Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan model hubungan dengan korelasi untuk 4 (empat) variabel. Dalam penelitian ini menggunakan model pengaruh dengan regresi linier berganda untuk 4 (empat) variabel.
2. **Variabel Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia) dan 1 (satu) variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Daerah). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi) dan 1 (satu) variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Daerah).
3. **Jumlah observasi/sampel (n):** Penelitian terdahulu meneliti 110 responden Staf bagian keuangan SKPD Kota Surakarta sedangkan penelitian ini meneliti 60 responden Staf bagian keuangan SKPD Kota Binjai.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2021.
5. **Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signal (*Signaling Theory*) dalam Pemerintah

Teori signaling merupakan teori yang menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah memiliki dorongan untuk menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah memberikan signal kepada masyarakat karena adanya asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Asimetri informasi terjadi karena pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat mengenai roda pemerintahan.

Wolk and Tearney, dalam Bestari (2013) menyatakan bahwa, “Berdasarkan teori *signaling*, pemerintah memberikan signal kepada masyarakat dalam bentuk informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya serta pengungkapan dengan penjelasan yang lebih detail. Hal itu dilakukan agar masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kinerja pemerintahan tersebut perlu diberitahukan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah maupun sebagai bentuk promosi yang memiliki tujuan politik. Hal positif dalam teori signaling yaitu apabila pemerintah memberikan informasi yang baik, maka dapat membedakan mereka dengan pemerintah lain yang tidak memiliki informasi yang baik dengan memberikan informasi tentang kondisi mereka”. Dengan sinyal positif dari pemerintah, diharapkan bisa mendapatkan respon positif dari masyarakat karena hal tersebut dapat memberikan penilaian yang lebih dari masyarakat kepada pemerintah.

Terdapat dua signal yang berhubungan dengan akuntansi yaitu signal langsung dan signal tidak langsung. Signal langsung meliputi aliran kas pemerintahan, sedangkan signal tidak langsung meliputi kebijakan keuangan, struktur modal, dan pemilihan kebijakan akuntansi. *Adverse selection* dalam pemerintahan dapat dikurangi dengan pengungkapan langsung, karena pengungkapan langsung dapat menjadi signal yang bisa dipercaya.

2.1.2 Teori Kegunaan Keputusan Informasi

Sejak Tahun 1954 telah dikenal dengan Teori Kegunaan Keputusan Informasi Akuntansi, dan menurut Ataubus dalam Lif (2017) telah menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standar Board* (FASB) yaitu *Statement Of Financial Accounting Concept* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 2 tentang kualitatif *Characteristic of Accounting Information* menggambarkan hirarki tentang kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan dan nilai reliabilitas. Nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kualitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Sedangkan reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan/bias serta mewakili apa yang digambarkan. Agar relevan informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu para pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi prediksinya.

Teori kegunaan keputusan informasi sangatlah relevan, karena Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia (SPIP) mengadopsi karakteristik-karakteristik dari SFAC Nomor 2. Hanya saja Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan pada empat persyaratan normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.1.3 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory, menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Teori ini

menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Haliah (2012) berpendapat bahwa, “Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya”.

LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan. Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang

lebih siap. Kontrak hubungan antara principals dengan stewards didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.4 Good Government

Good Government adalah pemerintahan yang baik dan benar dan juga bersih dari korupsi dan lain sebagainya dalam memimpin negaranya. Baik diberbagai bidang mulai dari pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat. Akan tetapi untuk mewujudkan *Good Government* tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat sendiri. Tetapi, pemerintahan daerah harus demikian. mengapa? Karena supaya dapat membawa kemajuan bagi negara serta akan terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Government*). Selain itu juga harus adanya partisipasi masyarakat (antara pemerintah dengan rakyat) demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan *Good Government* membutuhkan proses yang secara bertahap, tidak mungkin secara langsung terbentuk. Dan dimulai dari tingkat desa, jika ditingkat beberapa desa terbentuk maka menuju ke tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten, setelah itu ke tingkat provinsi, Dan apabila ditingkat beberapa provinsi sistem pemerintahannya telah terjadi *Good Government* baru

setelah itu ketingkat pemerintahan pusat. Atau sebaliknya, dari pemerintahan pusat menuju pemerintahan desa. Biasanya didalam suatu negara yang telah terbentuk sistem pemerintahan yang baik tidak menutup kemungkinan kehidupan warga negaranya makmur dan sejahtera serta terhindar yang namanya korupsi.

Negara yang sudah mewujudkan *Good Government* negara tersebut sudah bisa dikatakan sebagai negara yang maju dan telah menciptakan negaranya menjadi makmur dan sejahtera serta keadaan ekonomi dalam negara tersebut berkembang dengan baik dan tercapai tujuan bersama. Demikian penjelasan tentang *Good Government*.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

a. Penegrtian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Menurut Bastian dalam Putriasri (2017), “Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan *Review* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kualitas adalah, “Kualitas adalah tingkat (1) baik buruknya sesuatu atau (2) taraf atau derajat”. Menurut Yadiati (2017) kualitas pelaporan keuangan adalah, “Kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut

(Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual):

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 1. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 2. Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 3. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik.

- a) Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan
- Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasilhasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Entitas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabel

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengellaan, dan pengendalian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah

untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung

beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

d. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Komponen Laporan Keuangan pokok dalam Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional, yakni laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 5) Laporan Arus Kas, yakni laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya/
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Hasil kajian penelitian tentang penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah

Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting untuk mewujudkan tujuan dalam sebuah organisasi. Kompetensi sumber daya pegawai penatausaha keuangan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan akuntansi akan memberikan kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan. Menurut Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kade Sinarwati (2015) apabila Kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan baik sehingga memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai pedoman sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Vicky Agustiawan Lasoma (2013) semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

3) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi.

f. Indikator Kualitas laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator antara lain:

1) Relevan

Laporan Keuangan dikatakan relevan apabila informasi dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi yang relevan bercirikan memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, dapat diverifikasi, dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Kadek Desiana Wati dkk, 2015).

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. McClelland dalam Rivai (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Menurut Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 kompetensi adalah, “Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”.

Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan cukup akan bekerja lambat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Menurut Nawawi dalam Putriasri (2017), “Manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja dan lain-lain”. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sebagai karakteristik individu yang melekat, kompetensi terlihat pada cara berperilaku seseorang di tempat kerja. Kompetensi memiliki ciri atau karakteristik yang dipakai untuk membedakan antara seseorang yang berkinerja unggul dengan seseorang yang berkinerja rata-rata atau seseorang yang perilaku efektif dan perilaku yang tidak efektif. karakteristik kompetensi bagi organisasi, dapat membantu proses rekrutmen, seleksi, menentukan imbalan, pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, adalah sebagai berikut:

1) Motif (*motive*)

Adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan atau tujuan tertentu.

2) Sifat (*traits*)

Adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.

3) Konsep diri (*self-concept*)

Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai yang dijunjung tinggi seseorang serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.

4) Pengetahuan (*knowledge*)

Adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (*study, learning*) dan pengalaman (*experience*) serta intuisi (*intuition*). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan secara bersama-sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.

5) Keterampilan (*skill*)

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

Dan menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014) mengatakan bahwa, “Konsep diri, watak sifat dan motif kompetensi lebih tersembunyi, dalam dan berbeda pada titik sentral kepribadian seseorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan”. Kompetensi pengetahuan dan keahlian cenderung lebih nyata dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

c. Tipe-Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut menurut Abdul Halim (2013) adalah sebagai berikut:

1) *Planning Competency*

Dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.

2) *Influence Competency*

Dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.

3) *Communication Competency*

Dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4) *Interpersonal Competency*

Meliputi empati, pembangunan konsensus, *networking*, persuasi, negoisasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.

5) *Thinking Competency*

Berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6) *Organizational Competency*

Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

7) *Human Resources Management Competency*

Merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.

8) *Leadership Competency*

Merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.

9) *Client Service Competency*

Merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.

10) *Business Competency*

kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.

11) *Self Management Competency*

Kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.

12) *Technical/Operasional Competency*

Kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

d. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Abdul halim (2013) indikator kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.
- 2) Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal. Misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

3) Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilakukan.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi

a. Pengertian Penerapan Standar Akuntansi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, Tahun 2012 bahwa, “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984”.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.

Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah telah menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sesuai dengan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

International Monetary Fund (IMF), sebagai lembaga kreditor, menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debitornya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini, Karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi, basis akrual menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, basis. akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dapat dicatat, termasuk transaksi internal.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain:

- 1) Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
- 2) Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.

- 3) Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
- 4) Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
- 5) Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- 6) Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya kea tau melakukan bisnis dengan entitas.
- 7) Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

b. Indikator Penerapan Standar Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan indikator:

1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisitLRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.

3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris.

4) PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LaporanRealisasiAnggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

6) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomis dan sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
- Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

7) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan.

8) PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peraltan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses

pemerolehannya/pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan diperoleh.
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- c) Aktiva tersebut masih dalam proses pengerjaan.

9) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

10) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

11) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

12) PSAP No. 12 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan Operasional adalah pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam suatu entitas merupakan hal yang harus dilakukan agar mampu menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Berbagai pandangan terkait dengan pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Bornard dan Hopwood dalam Lif (2017), “Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia yang berhubungan untuk tujuan tertentu”.

Menurut Baridwan dalam Lif (2017) bahwa, “Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, kreditur, dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen)”.

b. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi agar penggunaan sistem informasi akuntansi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Daud dan Windana (2014) ada beberapa cara dalam penyusunan sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai.
- 2) Sistem informasi yang disusun harus memenuhi prinsip aman yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan ataupun aset daerah.
- 3) Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Hal senada juga dinyatakan oleh Machmud (2013) bahwa, “Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan integrasi dari sebuah sub-sistem/komponen baik secara fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”. Sedangkan Fadilah (2018) juga menyatakan bahwa, “Sistem informasi akuntansi merupakan susunan formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen”.

c. Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Dalam sistem informasi akuntansi ada beberapa unsur penting yang dijadikan pedoman bagi para petugas akuntansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wilkinson Lif (2017) mengungkapkan bahwa adapun unsur-unsur

tersebut adalah:

1) Sumber Daya Manusia dan Alat

Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam mengambil keputusan dan mengendalikan jalannya sistem komputer.

2) Data

Catatan merupakan dasar konsep pengendalian yang akurat yang menyediakan pengecekan atas penggunaan informasi-informasi.

3) Informasi. Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Informasi ini berupa hasil cetak komputer maupun tampilan monitor.

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi seperti sumber daya manusia, alat, data, dan informasi merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan daerah. Gelinas dalam Lif (2017) menyebutkan, “Efektivitas sistem informasi akuntansi sebagai ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang seharusnya menjadi perhatian bagi organisasi, secara luas digunakan oleh satu atau lebih pengguna dan meningkatkan kualitas kinerja mereka”.

2.2 Penulisan Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014)	“Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	Kompetensi SDM (X1), penegkan Penerapan SAP (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2	Vicky Agustian Lasoma (2013)	“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”.	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3	Angga Dwi Rahmadi (2013)	“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Kota Bandung”.	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.
4	Devi Rovieyanti (2012)	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda	Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
5	Putriasri Pujanira (2017)	“Pengaruh Kompetensi SDM, SAP dan Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah”.	Kompetensi SDM (X1), SAP (X2), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) dan Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi SDM, SAP dan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambarann sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya.

Yadiati (2017) menyatakan bahwa, “Kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar”.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya (Kadek Desiana wati, dkk, 2015).

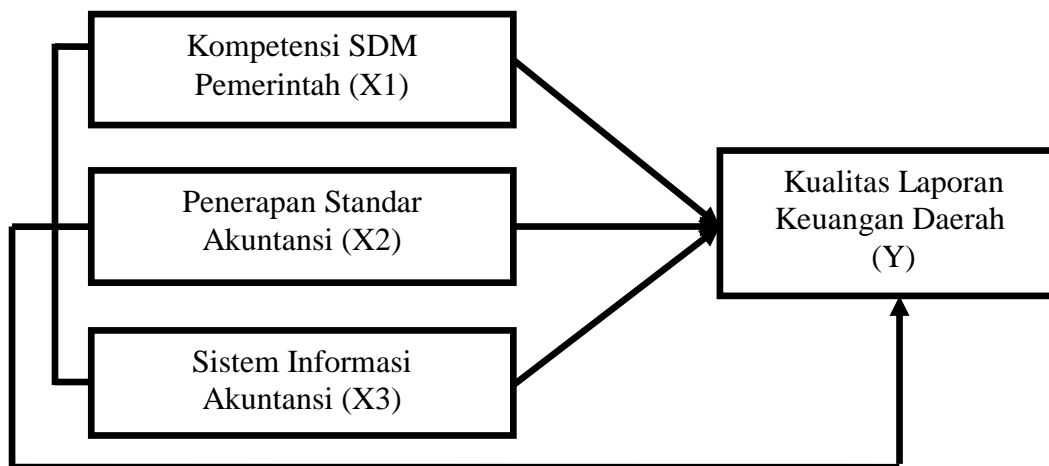
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, Tahun 2012 bahwa, “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984”.

Menurut Baridwan dalam Lif (2017) bahwa, “Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang

relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, kreditur, dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen)”.

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kompetensi SDM Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4. Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Kasmir (2012) menyatakan, “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini membahas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dimana, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sisitem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di sebagai variabel terikat”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Menurut Ghozali (2016), “Penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah data yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Binjai”.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari September 2020 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2020	2021	2021
1	Pengajuan Judul									
2	Penyusunan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Perbaikan/Acc Proposal									
5	Pengolahan Data									
6	Penyusunan Skripsi									
7	Bimbingan Skripsi									
8	Sidang Meja Hijau									

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa, “Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi objek dalam penelitian ini mencakup pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) bagian keuangan yang berkerja di SKPD (Satuan kerja Perangkat daerah) Kota Binjai.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) bagian keuangan yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dimana tidak dilakukan generalisasi terhadap sampel yang diambil. Teknik *purposive sampling* lebih digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) bagian keuangan yang berkerja di SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
- b. Memiliki Masa Kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang penanggungjawab anggaran, bendahara permasukan dan bendahara pengeluaran.

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Nama Dinas Kota Binjai	Kriteria			Koordinator Keuangan
		a	b	c	
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	✓	✓	✓	3
2	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	3
3	Dinas Sosial	✓	✓	✓	3
4	Dinas Pendapatan Daerah	✓	✓	✓	3
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	✓	✓	✓	3
6	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	3
7	Dinas Komunaksi & informatika	✓	✓	✓	3
8	Dinas Perhubungan Kota Binjai	✓	✓	✓	3
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	3
10	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	3
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	✓	✓	✓	3
12	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	3
13	Dinas Pertanian dan Perikanan	✓	✓	✓	3
14	Dinas Bina Marga	✓	✓	✓	3
15	Dinas Perpustakaan	✓	✓	✓	3
16	Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	✓	✓	✓	3
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	✓	✓	✓	3
18	Badan Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓	3
19	Badan Pertanahan Nasional	✓	✓	✓	3
20	Satuan Polisi Pamong Praja	✓	✓	✓	3
Jumlah					60

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.3.3 Jenis dan Sumber Data²

Ghozali (2016) menyatakan, Teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Jenis data

1) Data Kuantitatif

Data yang dihitung berupa angka-angka yang diperoleh dari SKPD Pemerintah Kota Binjai yang dapat dihitung, seperti jumlah kompensasi dan data-data lainnya yang menunjang penelitian.

2) Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari SKPD Pemerintah Kota Binjai, seperti gambaran umum organisasi perangkat daerah, hasil kuesioner dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang menunjang.

b. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung terhadap responden yang dalam hal ini mahasiswa.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di setiap SKPD Kota Binjai tersebut, dan hasil penelitian kepustakaan dan dari SKPD yang terkait.

3.4 Definisi Operasional Dan Variabel Penelitian

Ghozali (2016) menyatakan, “Operasionalisasi variabel adalah suatu pemecahan variabel yang terkandung menjadi bagian yang terkecil sehingga dapat diketahui klasifikasi ukurannya. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), Kompetensi SDM Pemerintah (X1), Penerapan Standar Akuntansi (X2) dan Sistem Informasi Akuntansi (X3)”.

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak berdiri sendiri serta menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat, baik itu secara positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Kompetensi SDM Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi.

Penjelasan dari definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. (Putriasri, 2017)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010)	<i>Likert</i>
Kompetensi SDM Pemerintah (X1)	Manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja dan lain-lain. (Putriasri, 2017)	1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) 2. Keterampilan (<i>Skill</i>) 3. Sikap (<i>Attitude</i>) (Abdul Halim, 2017)	<i>Likert</i>
Penerapan Standar Akuntansi (X2)	Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (PP No. 71 Tahun 2010)	1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas 3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas 4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan 5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi 7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan 9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban 10. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan 11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 12. PSAP No. 12 Laporan Operasional (PP No. 71 Tahun 2010)	<i>Likert</i>
Sistem Informasi Akuntansi (X3)	Suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, kreditur, dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen). (Badriwan dalam Lif, 2017)	1. Sumber Daya Manusia dan Alat 2. Data 3. Informasi (Wilkinson dalam Lif, 2017)	<i>Likert</i>

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasannya:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, website resmi, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian memperoleh data langsung dari pihak pertama (primer). Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *survey* yaitu dengan cara mengirimkan kusioner kepada kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di Kota Binjai secara langsung, agar dapat diterima langsung oleh subjek penelitian yaitu pegawai sub bagian keuangan. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kota Binjai sebagai responden dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Ghozali (2016), “Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan model regresi linear berganda yang bertujuan untuk menjelaskan kekuatan dan memberikan pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap suatu variabel dependen (Y). Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat, peneliti menggunakan

program komputer yang khusus untuk membantu pengelolaan statistik, yaitu program *SPSS (Statistical Packages for Social Sciences)*”.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2012), “Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Kompetensi SDM Pemerintah (X1), Penerapan Standar Akuntansi (X2) dan Sistem Informasi Akuntansi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)”.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2015:103), “Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”.

2) Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2016), “Mengemukakan bahwa uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai $\bar{\alpha} > 0,60$ ”.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *cara one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016), “Salah satu syarat yang mendasari penggunaan model regresi adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar pengujian lebih efisien”. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah:

- 1) Memiliki Distribusi Normal.
- 2) Tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel independen.
- 3) Tidak terjadi Heteroskedastisitas atau varian variabel pengganggu yang konstan (Homoskedastisitas).
- 4) Tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel independen.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas penelitian ini, digunakan metode Grafik *Normality P-Plot*, *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dan Histogram.

Dalam uji Grafik *Normality Probability Plot*, ketentuan yang digunakan adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali, (2016), Jika data tidak normal, ada beberapa cara mengubah model regresi menjadi normal adalah:

- a) Lakukan transformasi data, misalnya mengubah data menjadi bentuk logaritma (Log) atau natural (ln).

- b) Menambah jumlah data.
- c) Menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab tidak normalnya data.
- d) Menerima data apa adanya.

Pemilihan metode ini didasarkan bahwa *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* merupakan metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data terdistribusi normal

H_a : Data terdistribusi tidak normal

Jika $\sigma > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Jika $\sigma < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Menurut Ghozali (2016), “Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuannya bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal”.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (2016), “Tujuan uji multikolinieritas adalah menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen”. Jika dalam model regresi terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini adalah *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas *tolerance value* ≤ 0.1 dan $VIF \geq 10$ ”.

a) H_0 : *Tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, tidak terdapat multikolinieritas.

b) H_1 : *Tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, terdapat multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki variabel tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas”. Ada beberapa cara untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatter Plot* antara nilai prediksi variabel terkait yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID lewat program SPSS dengan pengambilan keputusan.

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016), Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = Kompetensi SDM Pemerintah

X2 = Penerapan Standar Akuntansi

X_3 = Sistem Informasi Akuntansi

a = Konstanta, besar nilai Y jika $X = 0$

b_1 - b_2 = Koefisien arah regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X .

e = *Standard Error*

3.6.5 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016), “Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial, yang menggunakan uji t dan uji F ”.

a. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2016), “Untuk menentukan tingkat signifikan secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tak bebas, maka hipotesis harus diuji dengan uji t pada taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ secara dua arah (*two tail*)”. Uji statistik t yang digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Setelah dilakukan uji hipotesis (uji t) maka kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan t tabel dengan t hitung yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikan (α) tertentu dengan derajat kebebasan (df) = $n-k$.

Kriteria untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.
- 2) Jika angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

Apabila H_0 diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan

sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Sugiyono (2010), “Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, maka dilakukan uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji statistik F”. Dirumuskan sebagai berikut:

Setelah mendapat F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%, artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau kolerasi kesalahan sebesar 5% yang mana akan diperoleh suatu hipotesis dengan syarat:

1. Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.
2. Jika angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

3.6.6 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Santoso (2012) menyatakan bahwa, “Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bias dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis linear berganda menunjukkan seberapa jauh variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tanjung Balai

Kota Binjai adalah salah satu kota penting di Sumatera Utara. Dikatakan penting karena Binjai terletak di daerah strategis dimana Kota Binjai sendiri merupakan pintu gerbang Kota Medan menuju Provinsi Aceh. Letaknya kurang lebih 22 kilometer di sebelah Kota Medan. Sebelum berstatus Kotamadya, Binjai adalah Ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah Barat dan Utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Kota Binjai juga merupakan salah satu Kotamadya di Sumatera Utara yang mempunyai catatan sejarah yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Kota Binjai secara historis terletak diantara dua Kesultanan Melayu yang besar, yaitu Kesultanan Langkat dan Kesultanan Deli. Luasnya wilayah kekuasaan kedua kesultanan ini berdampak pada perkembangan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kota Binjai sendiri mengalami perkembangan karena bagian dari luasnya wilayah kekuasaan kesultanan langkat.

Gambar 4.1 Logo Pemerintah Kota Binjai



a. Visi Kota Binjai

- 1) KOTA CERDAS (*SMART CITY*) bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 tahun kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang Cerdas (*Smart People*), Infrastruktur Pendukung Mobilitas Masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), Perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan (*Smart Economy & Smart Environment*).
- 2) KOTA LAYAK HUNI (*SMART LIVING*) mengandung pengertian bahwa optimalisasi pembangunan aspek fisik fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang dan lain-lain dan aspek non fisik (interaksi sosial, ekonomi, hukum dan politik) yang terwujud melalui indikator:
 - a) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih dan listrik);
 - b) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah dan kesehatan);
 - c) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan dengan bebas dari rasa takut;
 - d) mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya dan
 - e) sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
- 3) BERDAYA SAING mengandung pengertian bahwa kemajuan Kota Binjai diarahkan kepada peningkatan daya saing pada sektor permukiman, jasa, perdagangan dan industri dengan target capaian berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya investasi.

- 4) BERWAWASAN LINGKUNGAN mengandung pengertian bahwa pembangunan kedepan diarahkan dalam tindaklanjut pembangunan Kota Binjai *Eco-Green City* yang telah dimulai sejak 5 tahun terakhir.
- 5) SEJAHTERA mengandung pengertian terwujudnya peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara.

b. Misi Kota Binjai

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 2) Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera;
- 3) Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- 4) Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*);
- 5) Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

4.1.2 Karakteristik Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) koordinator keuangan. Dari kuisisioner yang disebarkan maka diperoleh hasil karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	26	43,3 %
2.	Perempuan	34	56,7 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 34 responden (56,7%), sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 responden (34%).

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	S1	39	65 %
2	S2	21	35 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 (65%) dengan jumlah responden sebanyak 39 responden dan yang memiliki pendidikan S2 (35%) dengan jumlah responden sebanyak 21 responden.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	26 s.d 30 Tahun	12	20 %
2	31 s.d 40 Tahun	32	53,3 %
3	> 40 Tahun	16	26,7 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa usia pegawai yang berusia 26-30 tahun (20%) yaitu sebanyak 12 pegawai. Kemudian usia 31-40 tahun (53,3%) sebanyak 32 pegawai, dan usia diatas 40 tahun (26,7%) sebanyak 16 orang pegawai. Usia 31-40 tahun merupakan usia produktif yang memiliki pengalaman kerja yang cukup, untuk memenuhi pencapaian target pekerjaan yang telah ditetapkan organisasi.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	1-10 Tahun	32	53,3 %
2	11-20 Tahun	15	25 %
3	>20 Tahun	13	21,6 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa, 32 responden atau sebanyak 53,3% mempunyai masa kerja 1-10 tahun, dimana mayoritas dari para pegawai berada pada masa kerja yang produktif.

4.1.3 Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian keuangan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), sebelum kuisisioner disebarkan kepada 40 responden, penulis terlebih dahulu melakukan *try out* kepada 20 orang responden dengan memberikan 30 butir pertanyaan yang dibagi menjadi 4 variabel yaitu

Kualitas Laporan keuangan Daerah (Y), Kompetensi SDM Pemerintah (X1), Penerapan Standar Akuntansi (X2) dan Sistem Informasi Akuntansi (X3) untuk menguji valid dan reliabelnya seluruh pernyataan tersebut. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	Y.1	0,885	0.210	Valid
2	Y.2	0,685	0.210	Valid
3	Y.3	0,788	0.210	Valid
4	Y.4	0,899	0.210	Valid
5	Y.5	0,925	0.210	Valid
6	Y.6	0,510	0.210	Valid
7	Y.7	0,935	0.210	Valid
8	Y.8	0,866	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kompetensi SDM Pemerintah (X1)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X1.1	0.735	0.210	Valid
2	X1.2	0.908	0.210	Valid
3	X1.3	0.742	0.210	Valid
4	X1.4	0.900	0.210	Valid
5	X1.5	0.722	0.210	Valid
6	X1.6	0.907	0.210	Valid
7	X1.7	0.912	0.210	Valid
8	X1.8	0.931	0.210	Valid
9	X1.9	0.898	0.210	Valid
10	X1.10	0.803	0.210	Valid
11	X1.11	0.780	0.210	Valid
12	X1.12	0.866	0.210	Valid
13	X1.13	0.885	0.210	Valid
14	X1.14	0.530	0.210	Valid
15	X1.15	0.396	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi (X2)

No	Butir Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	X2.1	0.486	0.210	Valid
2	X2.2	0.685	0.210	Valid
3	X2.3	0.673	0.210	Valid
4	X2.4	0.550	0.210	Valid
5	X2.5	0.703	0.210	Valid
6	X2.6	0.745	0.210	Valid
7	X2.7	0.730	0.210	Valid
8	X2.8	0.486	0.210	Valid
9	X2.9	0.685	0.210	Valid
10	X2.10	0.673	0.210	Valid
11	X2.11	0.766	0.210	Valid
12	X2.12	0.597	0.210	Valid
13	X2.13	0.616	0.210	Valid
14	X2.14	0.766	0.210	Valid
15	X2.15	0.670	0.210	Valid
16	X2.16	0.789	0.210	Valid
17	X2.17	0.656	0.210	Valid
18	X2.18	0.847	0.210	Valid
19	X2.19	0.976	0.210	Valid
20	X2.20	0.814	0.210	Valid
21	X2.21	0.759	0.210	Valid
22	X2.22	0.572	0.210	Valid
23	X2.23	0.585	0.210	Valid
24	X2.24	0.683	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi (X3)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X3.1	0,718	0.210	Valid
2	X3.2	0,428	0.210	Valid
3	X3.3	0,440	0.210	Valid
4	X3.4	0,839	0.210	Valid
5	X3.5	0,556	0.210	Valid
6	X3.6	0,795	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$) (Ghozali, 2015).

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i> ($\bar{\alpha}$)	N Of Item
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0.948	8
Kompetensi SDM Pemerintah	0.882	15
Penerapan Standar Akuntansi	0.887	24
Sistem Informasi Akuntansi	0.958	6

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y), kompetensi SDM pemerintah (X1). penerapan standar akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) memiliki nilai *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$) yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y), kompetensi SDM pemerintah (X1). penerapan standar akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) dalam penelitian ini

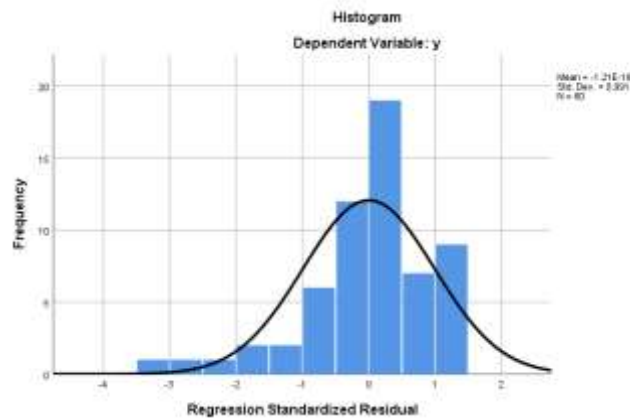
adalah reliabel.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

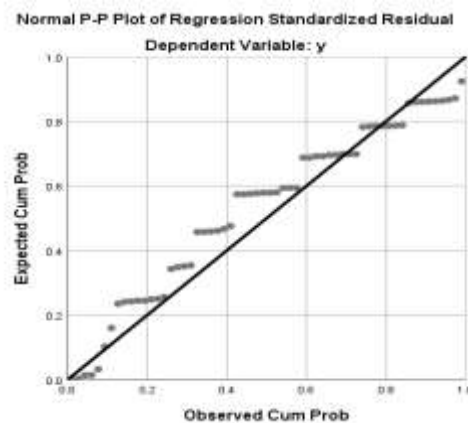
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2015).

Gambar 4.2 Grafik Histogram



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Gambar 4.3 Grafik Normality P-plot



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan gambar 4.2 dan 4.3 di atas, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.92814196
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.041
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2015), “Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model”. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang di hasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Output nya tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi SDM Pemerintah	.891	1.122
	Penerapan Sistem Akuntansi	.897	1.115
	Sistem Informasi Akuntansi	.899	1.001

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

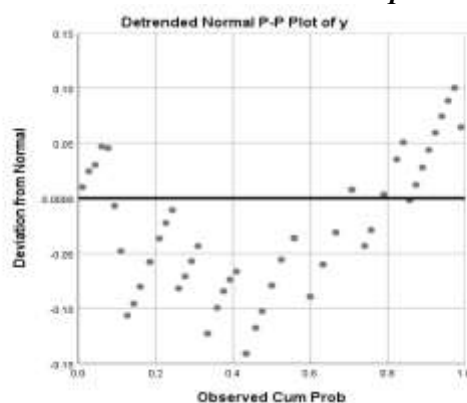
c) Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar

Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Gambar 4.4 Grafik *Scatterplot*



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Pada gambar 4.4 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian pada persamaan regresi linear berganda dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2015), “Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen”. Hasil uji regresi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-.899	7.582	
	Kompetensi SDM Pemerintah	.345	.157	.273
	Penerapan Sistem Akuntansi	.332	.105	.395
	Sistem Informasi Akuntansi	.350	.096	.432
a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Daerah				

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dari tabel 4.12 di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

$$Y = -0,899 + 0,345 X_1 + 0,332 X_2 + 0,350 X_3$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0$, $X_2 = 0$, $X_3 = 0$) maka variabel dependen akan sebesar -0,899.
2. Variabel kompetensi SDM pemerintah sebesar 0,345 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel kompetensi SDM pemerintah sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,345 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Variabel penerapan sistem akuntansi sebesar 0,332 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel penerapan sistem akuntansi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,332 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,350 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel sistem informasi akuntansi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,350 dengan

asumsi variabel lain dianggap tetap.

4.1.6 Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji-t)

Ghozali (2015) menjelaskan bahwa, “Uji t-statistik diperlukan untuk melihat nyata tidaknya pengaruh variabel yang dipilih terhadap variabel yang diteliti. Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial”. Dengan menguji satu arah dalam tingkat signifikansi = α dan $df = n - k$ (n =jumlah observasi, k =jumlah parameter) maka hasil pengujian akan menunjukkan:

1. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

**Tabel 4.13 Uji Statistik Parsial (Uji-t)
Coefficients^a**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.899	7.582		2.658	.013
	Kompetensi SDM Pemerintah	.345	.157	.273	3.384	.002
	Penerapan Sistem Akuntansi	.332	.105	.395	3.160	.004
	Sistem Informasi Akuntansi	.350	.096	.432	3.655	.001
a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Daerah						

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Tabel 4.13 di atas menunjukkan hasil uji statistik t antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kompetensi SDM pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi SDM pemerintah berpengaruh positif

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Variabel penerapan sistem akuntansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,160 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif besar 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Variabel sistem informasi akuntansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Jadi, berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

2) Uji Simultan (Uji-F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-F (*F test*). Uji-F dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan ketentuan:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 4.14 Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.832	3	13.944	14.304	.027 ^b
	Residual	222.558	59	9.273		
	Total	264.390	60			

a. Dependent Variable: Kualitas_Lapotan_Keuangan_Daerah
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Setelah uji-F dilakukan, maka diperoleh nilai F_{hitung} dan nilai signifikansi. Nilai F_{hitung} sebesar 14,304 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2), dan sistem informasi akuntansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar $0.000 <$ dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0.05$ mengindikasikan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.

4.1.7 Koefisien Determinasi R^2 (*Adjusted R-Square*)

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat jika nilai R berada di atas 0.5 dan mendekati nilai 1. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R square* adalah nol sampai dengan satu. Apabila nilai *R square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R square*,

maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, nilai adjusted *R square* digunakan untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 ^a	.693	.644	.14803	2.482
a. Predictors: (Constant), Y					
b. Dependent Variable: X1, X2, X3					

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dilihat dari tabel 4.15 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,644 atau 64,4% yakni berarti variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3), sisanya 35,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

4.2 Pembahasan

Hasil uji regresi linier berganda yang di dapat adalah kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Febrian Haty Ramadhan Parera dan Teguh Erawati (2018) yang menyatakan bahwa, “Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah”.

1. Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Secara teori Menurut Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 kompetensi adalah, “Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”. Jika dilihat pada Kota Binjai sumber daya yang dimiliki terbilang cukup baik karena pegawai yang berkaitan dalam membuat laporan keuangan selalu menyampaikan pelaporannya tepat dan sesuai dengan waktunya.

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia. Maka dari itu untuk meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi. Hal ini juga mendukung teori stewardship bahwa sumber daya manusia yang tidak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasinya.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik guna mencapai tujuan organisasinya. Kompetensi tak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan tetapi bisa juga dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setempat dapat diperoleh. pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Devi Rovieyanti (2012) yang menyatakan bahwa, “Kompetensi sumber daya manusia pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah”. Jika kompetensi SDM pemerintah pada Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Binjai memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing maka akan membantu keualitas laporan keuangan pemerintah menjadi semakin baik.

Variabel kompetensi SDM pemerintah (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi SDM pemerintah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

2. Pengaruh Penerapan Sitem Akuntansi (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Secara teori Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, Tahun 2012 bahwa, “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984”. Kota Binjai menggunakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. Oleh sebab itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai dituntut untuk

membuat laporan keuangan daerah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 tersebut.

Dengan adanya penerapan sistem akuntansi laporan keuangan yang dihasilkan lebih jelas dan mudah dipahami serta dapat dibuktikan kebenarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, “Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja”.

Penelitian ini tidak mendukung teori *stewardship*. Teori tersebut didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Dari teori dapat menjelaskan pemerintah sebagai steward akan meningkatkan kompetensi pegawai sebagai upaya yang terbaik pada masyarakatnya sebagai principal. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dibutuhkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) yang menyatakan bahwa, “Penerapan sistem akuntansi (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y)”. Jika setiap pegawai koordinator bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai membuat laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK) maka dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi kesalahan dalam laporan keuangan daerah dan

akan memunculkan keseragaman dalam penyajiannya.

Variabel penerapan sistem akuntansi (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,160 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif besar 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem akuntansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Secara teori Menurut Baridwan dalam Lif (2017) bahwa, “Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, kreditur, dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen)”. Pada Kota Binjai sistem informasi akuntansi yang berlaku diatur pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai harus memenuhi peraturan yang diberlakukan dalam membuat laporan keuangan sehingga memiliki kualitas yang baik.

Teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Hal ini juga berarti bahwa terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan. Selain itu, hal ini juga mendukung teori kegunaan informasi bahwa

demikian mencapai kandungan kualitas primer dari laporan keuangan pemerintah maka diperlukan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membuat pekerjaan pegawai lebih akurat dan cepat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Vicky Agustawan Lasoma (2013) yang menyatakan bahwa, “sistem informasi akuntansi (X3) pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y)”. Pegawai koordinator keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai harus memberikan informasi mengenai keuangan secara baik. Oleh sebab itu, jika pegawai bagian keuangan mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

Variabel sistem informasi akuntansi (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t tabel sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

4. Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah (X1), Penerapan Sistem Akuntansi (X2) dan Sistem Informasi Akuntansi (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Secara teori Menurut Yadiati (2017) kualitas pelaporan keuangan adalah, “Kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan

wajar”. Pada Kota Binjai saat ini sudah menggunakan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam membuat laporan keuangan Kota Binjai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Sistem pengendalian intern yang memadai dapat berperan dalam memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut berupa pelatihan juga diperlukan untuk mempertahankan kompetensi sumber daya manusia dari ilmu yang kian hari semakin berkembang. Sehingga dari sistem pengendalian intern mampu memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Jika seluruh pegawai bagian keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Binjai memiliki kompetensi SDM pemerintah yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya maka akan memberikan perkembangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu jika seluruh pegawai bagian keuangan dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin terlihat baik dan tidak terjadi kesalahan dalam penyajiannya. Sehubungan kualitas laporan keuangan daerah, maka sistem informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai patokan utama bagi setiap pegawai bagian keuangan. Apabila

pegawai telah mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan sangat baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula kedepannya.

Hasil uji-F menunjukkan bahwa, Nilai Fhitung sebesar 14,304 sedangkan Ftabel sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ Dengan demikian maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2), dan sistem informasi akuntansi (X3) secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 40 dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kompetensi SDM pemerintah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.
2. Penerapan sistem akuntansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.
3. Sistem informasi akuntansi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kota Binjai.
4. Kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai

Dengan adanya penelitian ini maka pimpinan bisa lebih selektif lagi dalam menilai kinerja pegawai bagian keuangan dalam membuat laporan keuangan daerah sehingga pegawai dapat menyajikan pelaporan keuangan dengan baik dan relevan. Salah satu pertimbangan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa pimpinan bisa mengevaluasi terkait kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Dengan demikian pimpinan akan mampu mengontrol dan membimbing pegawai koordinator keuangan dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan daerah.

2. Bagi Sub Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pengendali internal instansi/organisasi terutama sub bagian keuangan dalam membuat laporan keuangan dan menjadi informasi yang dapat membantu sub bagian keuangan dalam mengoptimalkan penyajian laporan keuangan agar memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, penting bagi pegawai sub bagian keuangan memiliki kompetensi SDM pemerintah dan menggunakan aturan akuntansi sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah secara baik dan benar guna mendukung tercapainya tujuan instansi/organisasi.

3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan dalam melakukan penelitian dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengaruh kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengambil sampel perusahaan pada sektor publik yang berbeda dan jumlah sampel banyak sehingga menghasilkan informasi yang mendukung. Variabel yang digunakan dapat ditambah dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ap, Nst Dan Rs Sari. 2020. *Analisis Penerapan Sistem Prosedur Dan Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan Pada Pemerintah Kota Binjai*. Medan: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi,
- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Bpfe.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Bpk Ri. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016*. Diakses Pada 22 September 2020. [Http://Www.Bpk.Go.Id/Ihps](http://www.bpk.go.id/ihps).
- Dharma, Aditia Dito. 2018. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Medan: Jurnal Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadilah, Sri. 2018. *Studi Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Manajemen Strategi. (Pada Pt Telkom Persero, Tbk Divisi Regional Iii Jawa Barat Dan Banten)*. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*. Volume 1. Nomor 1. Januari. Hal. 65-81.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19 Edisi 5*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 278-289.
- Jogiyanto. 2010. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Bpfe.
- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No. 1*.

- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Keenam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46 A Tahun 2007. *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*. Diakses Pada Tanggal 26 September 2020, Pukul 13.02 Wib, Dari [Http://Mahsanafifiles.Wordpress.Com](http://Mahsanafifiles.Wordpress.Com).
- Lasoma, Vicky Agustiawan. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Skripsi Universitas Gorontalo.
- Machmud, Rizan. 2013. *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa*. Jurnal Capacity Stie Amkop Makassar. Volume 9. Nomor 3. September. Issn: 1907-3313.
- Mulyadi. 2011. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Sari, P. B., & Siahaan, A. P. U. (2018). Online Shoppers Acceptance: An Exploratory Study. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(6), 793-799.
- Nasution, N. A., & Oktari, A. (2021). Pengaruh Cash Flow, Account Receivable Turnover, Modal Kerja Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 91-115.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Diakses Pada Tanggal 26 September 2020, Pukul 13.03 Wib, Dari [Http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id](http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal*. Diakses Pada Tanggal 26 September 2020, Pukul 13.57 Wib, Dari [Http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id](http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id).
- Peraturan Pemerintah (Pp) No. 71 Tahun 2010 *Tantang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Diakses Pada Tanggal 26 September 2020, Pukul 10.45 Wib, Dari [Http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id](http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id).
- Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses Pada Tanggal 26 September 2020, Pukul 16.32 Wib, Dari [Http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id](http://Www.Djpk.Depkeu.Go.Id).
- Permadi, Dwi Angga. 2013. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Kota Bandung*. Skripsi Universitas Widyatama Bandung.

- Permendagri No. 4 Tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Diakses Pada Tanggal 26 September 2020, Pukul 14.22 Wib, Dari [Http://Keuda.Kemendagri.Go.Id](http://Keuda.Kemendagri.Go.Id).
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses Pada Tanggal 27 September 2020, Pukul 19.56 Wib, Dari [Http://Portal.Mahkamahkonstitusi.Go.Id](http://Portal.Mahkamahkonstitusi.Go.Id).
- Pramono Hariadi, Dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta :Salemba Empat.
- Pujanira, Putriasri. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sdm, Sap Dan Penerapan Sisitem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rovieyanti, Devi. 2012. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Tasikmalaya*. Journal Accounting Vol 1 No.1.
- Santoso. 2014. *Manajemen Keuangan "Teori Dan Aplikasi"*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Bpfe.
- Setiawati, Erma. 2014. *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi*. Call For Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diambil Pada 27 September 2020, Dari [Http://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id](http://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Veithzal, Rivai. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudianta, Erawati. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.